



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman : <http://www.kemnaker.go.id> Surel : persuratan@kemnaker.go.id

04 Juli 2025

Nomor : 5/279/KP.08/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Sepuluh Halaman
Hal : Pemberitahuan

Yth. Kepala Badan Yang Membedangi
Kepegawaian/SDMA Provinsi
(Daftar Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji K3.

Kementerian Ketenagakerjaan RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja selaku Lembaga yang ditugaskan untuk membina kedua jabatan fungsional dimaksud akan menyelenggarakan Uji Kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi atau pengangkatan ke dalam kedua Jabatan Fungsional tersebut melalui jalur perpindahan dari jabatan lain sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan pemberitahuan mengenai pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Fungsional Penguji K3 Gelombang II Tahun 2025.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan
Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Hery Sutanto, S.T., M.M.
NIP 19710922 199703 1 002

Tembusan:

- Dirjen Binwasnaker dan K3;
- Kepala Dinas Yang Membedangi Ketenagakerjaan Provinsi se-Indonesia.

Lampiran I

Nomor : 5/279/KP.08/VII/2025

Tanggal : 04 Juli 2025

**DAFTAR NAMA KEPALA BADAN YANG MEMBIDANGI
KEPEGAWAIAN/SDMA PROVINSI**

1. Kepala Badan Kepegawaian Aceh;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah D.I.Yogyakarta;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo;
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
14. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
18. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
19. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
20. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
21. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku;
22. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara;
23. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
25. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua;
26. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat;
27. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
28. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
30. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
32. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
33. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;
34. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
35. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah;
36. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua Selatan;
37. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Pegunungan; dan
38. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat Daya.

Lampiran II
Nomor : 5/279/KP.08/VII/2025
Tanggal : 04 Juli 2025

**PENGUMUMAN
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3
GELOMBANG II TAHUN 2025**

A. KETENTUAN UMUM

1. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Fungsional Penguji K3 merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dari Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
2. Pengusulan calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Fungsional Penguji K3 di lingkungan Ditjen Binwasnaker dan K3 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. JPT Pratama atau Kepala Balai K3 menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi kepada Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3.
 - b. Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3 mengajukan permohonan Rekomendasi Usulan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3 kepada Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur.
 - c. Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3 menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
3. Usulan calon peserta Uji Kompetensi untuk setiap Jabatan Fungsional menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV dengan melampirkan berkas/dokumen administrasi sesuai dengan persyaratan peserta Uji Kompetensi.
4. Calon peserta Uji Kompetensi wajib mengisi data dan melampirkan dokumen persyaratan melalui link https://bit.ly/usulan_ujikom_wasujik3.
5. Jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Fungsional Penguji K3 Gelombang II Tahun 2025, sebagai berikut:

NO	TAHAPAN KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pendaftaran/Usulan Calon Peserta	7 Juli s.d 22 Agustus 2025
2.	Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Peserta	27 Agustus 2025
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	1 September 2025
4.	Pembukaan Uji Kompetensi secara Virtual	16 September 2025
5.	Pembimbingan, Penyusunan dan Penyampaian Portofolio	16 September s.d 17 Oktober 2025

6.	Rapat Pleno Hasil Uji Portofolio oleh Tim Penguji	21 s.d 22 Oktober 2025
7.	Pengumuman Hasil Uji Portofolio	24 Oktober 2025
8.	Uji Wawancara/Praktik secara Offline	4 s.d 7 November 2025

6. Usulan calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3 Gelombang II Tahun 2025 diterima paling lambat tanggal **22 Agustus 2025**.
7. Usulan calon peserta Uji Kompetensi yang akan diproses adalah usulan yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
8. Sekretariat Uji Kompetensi akan melakukan seleksi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan berdasarkan dokumen/data calon peserta yang dilampirkan, dan selanjutnya calon peserta yang lolos seleksi akan ditetapkan dan diumumkan sebagai peserta uji kompetensi.
9. Pengumuman daftar calon peserta Uji Kompetensi yang memenuhi persyaratan akan disampaikan melalui surat kepada Pengusul dengan tembusan ke unit kerja peserta.
10. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdri. Dwi Ferthasari (081311064334)** atau **Sdri. Inayati Ulin Na'mah (No HP. 081809451228)** dari Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3.

B. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

1. Untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Fungsional Penguji K3 melalui jalur perpindahan dari jabatan lain.

Bagi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3 melalui jalur perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dalam pelaksanaan tugas di bidang:
 - 1) Pengawasan Ketenagakerjaan bagi yang akan berpindah ke Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - 2) Pengujian K3 bagi yang akan berpindah ke Jabatan Fungsional Penguji K3.
- b. Nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Usulan Uji Kompetensi diajukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum memasuki usia pengangkatan yang dipersyaratkan paling tinggi, yaitu:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Madya.

Melampirkan berkas/dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. Salinan Surat Keputusan Pangkat/Golongan Ruang Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Salinan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- d. Salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3;
- e. Salinan Hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan Uji Kompetensi (sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 Tanggal 24 Januari 2024 Perihal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi);
- f. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman Disiplin (Lampiran IV);
- g. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran V);
- h. Salinan Keputusan Menteri PANRB tentang Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 di instansi pengusul;

2. Kenaikan Jenjang Jabatan Satu Tingkat Lebih Tinggi:

Bagi PNS yang akan naik jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
- b. Telah menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
- c. Nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Melampirkan berkas/dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. Salinan Surat Keputusan Pangkat/Golongan Ruang Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Salinan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Salinan Surat Keputusan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3;
- e. Salinan Riwayat Penetapan Angka Kredit (PAK) mulai dari PAK Integrasi sampai dengan PAK terakhir yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
- f. Salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3;
- g. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman Disiplin (Lampiran IV);
- h. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran V).

C. METODE PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Uji Kompetensi menggunakan metode:

1. Uji Portofolio

Penilaian portofolio adalah penilaian terhadap bukti hasil pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Peserta yang telah lulus uji portofolio, maka bisa melanjutkan Uji Kompetensi ke tahap berikutnya, yaitu uji wawancara/praktik.

2. Uji Wawancara/Praktik

Uji wawancara/praktik dilakukan melalui tanya jawab dan praktik atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3 sesuai dengan jenjangnya untuk melihat

kemampuan peserta uji dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Direktur Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Hery Sutanto, S.T., M.M.
NIP 19710922 199703 1 002

Lampiran III

Nomor : 5/279/KP.08/VII/2025

Tanggal : 04 Juli 2025

**FORMULIR USULAN CALON PESERTA UJI KOMPETENSI
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN / PENGUJI K3 YANG AKAN NAIK JENJANG**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	TMT PANGKAT/ GOL	JABATAN SAAT INI	NOMOR DAN TANGGAL SK PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	NILAI PAK TERAKHIR (PERIODE TAHUN)	NILAI SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR	DIKLAT FUNGSIONAL YANG PERNAH DIIKUTI	EMAIL & NO.HP CALON PESERTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan :

Data harus diisi dengan lengkap dan benar, serta melampirkan dokumen pendukung

(Tempat), (Tanggal/Bulan/Tahun)

Ttd

(Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi...)

Lampiran IV

Nomor : 5/279/KP.08/VII/2025

Tanggal : 04 Juli 2025

**FORMULIR USULAN CALON PESERTA UJI KOMPETENSI
BAGI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN/PENGUJI K3**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	TMT PANGKAT/ GOL	JABATAN SAAT INI	NOMOR DAN TANGGAL SK PENGANGKATAN JABATAN TERAKHIR	NILAI SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR	DIKLAT FUNGSIONAL YANG PERNAH DIIKUTI	EMAIL & NO.HP CALON PESERTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan :

Data harus diisi dengan lengkap dan benar, serta melampirkan dokumen pendukung.

(Tempat), (Tanggal/Bulan/Tahun)

Ttd

(Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi...)

Lampiran V

Nomor : 5/279/KP.08/VII/2025

Tanggal : 04 Juli 2025

KOP INSTANSI

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN
NOMOR :**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

menerangkan dengan sebenarnya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan data kepegawaian yang ada, yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3.

(Kepala Dinas yang Membidangi
Ketenagakerjaan Provinsi)

(Nama Lengkap)
NIP

Lampiran VI
Nomor : 5/279/KP.08/VII/2025
Tanggal : 04 Juli 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas Foto 3 x 4



I. Data Pribadi

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	
3.	Nomor Induk Pegawai (NIP)	
4.	Pangkat/ Golongan Ruang/ TMT	
5.	Jabatan Saat Ini/ TMT	
6.	Unit Kerja	
7.	Instansi	
8.	Alamat Instansi	
9.	Tempat Lahir	
10.	Tanggal Lahir	
11.	Jenis Kelamin	
12.	Agama	
13.	Status Perkawinan	
14.	E-mail	
15.	Nomor Handphone (Aktif WA)	
16.	Alamat Tempat Tinggal	

II. Pendidikan....

II. Pendidikan Formal

No	Tingkat	Nama Sekolah / Perguruan Tinggi	Akreditasi	Tempat	STTB / Ijazah			Gelar	
					Nomor	Tanggal	Pejabat Penandatanganan	Depan	Belakang
	S1								
	S2								
	dst...								

III. Pendidikan dan Pelatihan

No	Nama Kursus / Latihan	Lamanya		Nomor STTPL/ Sertifikat	Tempat	Institusi Penyelenggara
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			

IV. Kegiatan Ilmiah/ Seminar

No	Nama Kegiatan Ilmiah/Seminar	Nama Penyelenggara	Tahun	Keterangan (Peserta/ Narasumber)

V. Riwayat....

V. Riwayat Jabatan

No	Unit Kerja/ Instansi	Jabatan	Lamanya		Surat Pengangkatan			Tanggal Pelantikan
			Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Nomor	Tanggal	Pejabat Penandatanganan	

VI. Riwayat Pangkat

No	Nama Pangkat	Surat Pengangkatan			TMT
		Nomor	Tanggal	Pejabat Penandatanganan	

Kota, Tanggal Bulan Tahun
Yang membuat

(Nama Lengkap)